

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K I P)
TRIWULAN II TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Pangeran Santri no. 111 Sumedang kode pos 45311

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Triwulan II Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2022, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Sumedang Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Triwulan II Tahun 2022 disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan Triwulan II memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2022 – 2023 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2020 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sumedang, 30 Juni 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMEDANG



Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	9
1.3 Tupoksi	10
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	10
1.5 Uraian Singkat Organisasi	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Perencanaan Strategis	16
2.2 Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja	23
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	23
BAB IV PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	98
4.2 Perbaikan Kedepan	99
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *goodgovernance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi

pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
- 7) Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
- 8) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP di Kabupaten Sumedang
- 9) Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2021(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 97);

- 10) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 196 tahun 2021 tentang Uraian Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.1 Tugas Pokok

11) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 196 tahun 2021 tentang Uraian Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

1.3.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi layanan sebagai berikut :

Kepala Badan, tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur;
- c. menyelenggarakan mengendalikan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,

penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, serta sosial dan budaya;

- f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya;
- g. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
- h. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. menyelenggarakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten;
- j. menyelenggarakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten
- k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- l. memberi laporan informasi, saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati dalam hal urusan kesatuan bangsa dan politik;
- m. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; m. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibantu oleh:

- a. Sekretaris;
- b. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- c. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

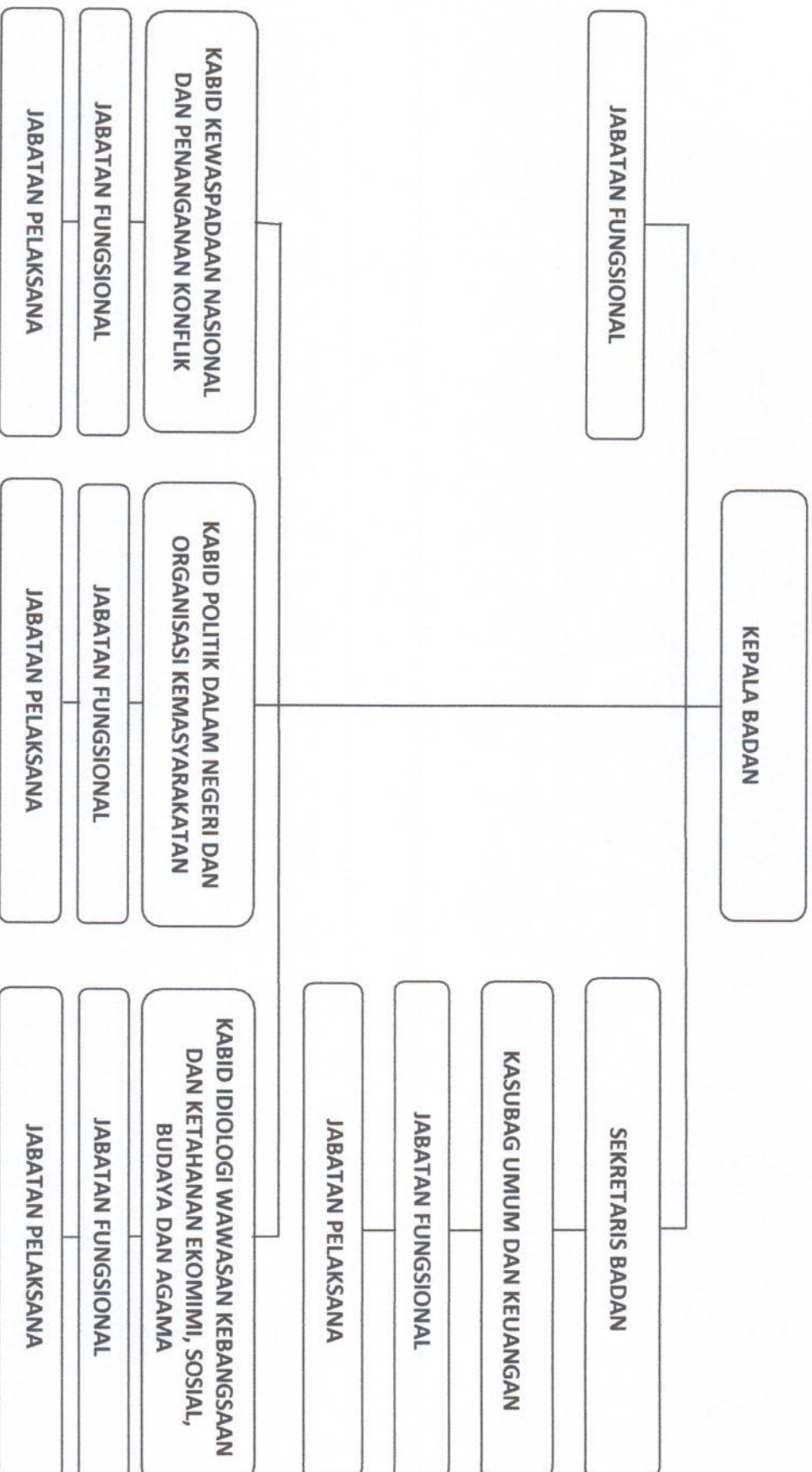
2.1 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris;
- c. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- d. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat;
- e. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Bupati Sumedang Nomor 196 Tahun 2021 Tentang uraian tugas jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebagaimana Gambar 2.1.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMEDANG



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : Perbup Sumedang Nomor 196 tahun 2021

Sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 35 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.4.a. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebagai berikut .

Tabel 2.9 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Kepala Badan	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat Badan	-	-	-	-	-	-	1	1
3	Subag Umum dan Keuangan	2	1	4	2	3	2	3	17
4	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	2	1	1	2	6
5	Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	1	-	-	1	1	1	1	5
6	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	-	1	-	2	-	-	2	5
TOTAL		3	2	4	7	5	4	10	35

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
31 Maret 2022

2.2.4.b Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang, adalah mereka yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 6 orang pegawai, golongan III sebanyak 3 orang pegawai, golongan II sebanyak 6 orang pegawai.

Tabel 2.10 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Unit Wilayah	Golongan			JUMLAH
		II	III	IV	
1	Kepala Badan	-	-	1	1
2	Sekretariat Badan	-	-	1	1
3	Subag Umum dan Keuangan	4	2	-	6
4	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	-	1	1	2

No	Unit Wilayah	Golongan			JUMLAH
		II	III	IV	
5	Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	1	-	1	2
6	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1	-	2	3
TOTAL		6	3	6	15

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
31 Maret 2022

2.2.4.c Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SLTP sejumlah 1 orang, SLTA 18 orang, D3 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 13 orang, sedangkan S2 sebanyak 3 orang.

Tabel 2.11 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	Kepala Badan	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat Badan	-	-	-	1	-	1
3	Subag Umum dan Keuangan	1	11	1	5	-	18
4	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	-	2	-	3	-	5
5	Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	-	3	-	2	-	5
6	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	-	2	-	1	2	5
TOTAL		1	18	1	12	3	35

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
31 Maret 2022

2.2.4.d Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 2 jabatan struktural dari 6 jabatan struktural. Sehingga pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 2 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4 Sedangkan sisanya adalah Pelaksana. Namun kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana belum

dipetakan sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	1
4	Fungsional Tertentu	1
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	8
TOTAL		15

Sumber : *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang*
31 Maret 2022

2.2.4.e. Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjenis kelamin perempuan berjumlah 7 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 28 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Kepala Badan	-	1	1
2	Sekretariat Badan	-	1	1
3	Subag Umum dan Keuangan	5	13	18
4	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	1	4	5
5	Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	1	4	5
6	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	-	5	5
TOTAL		7	28	35

Sumber : *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang*
31 Maret 2022

2.2.4.f. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan :

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	-	4	4
3	Eselon IV	1	-	1
TOTAL		1	5	6

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
31 Maret 2022

2.2.4.g. Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sumedang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki gedung Badan yang kurang memadai untuk kelancaran aktivitas Badan, antara lain belum memiliki ruangan rapat.

Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dirasakan sudah memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum Aset khususnya aset tetap maupun aset intangible atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.12 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan roda 4	4	4	-	
2.	Kendaraan roda 2	13	6	1	6 kendaraan roda 2 hilang
3.	Kartu Inventaris Barang (KIB B)	466	430	36	
4.	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	75	75		Masuk sebagai aset tetap lainnya

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
5.	Aset Tidak Berwujud	Rp. 12.628.344,80			Masuk dalam jasa jaringan internet
6.	Buku Perpustakaan	75	75		Masuk sebagai aset tetap lainnya

Sumber : Dokumen Rekonsiliasi Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang 31 Maret Tahun 2022

2.3 Gambaran Capaian Kinerja Pelayanan, Peralihan Nomenklatur dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.13., sebagai berikut :

Tabel 2.13 Kinerja Pelayanan sesuai Perubahan Renstra Badan KESBANGPOL Tahun 2019-2023

No	Indikator	Realisasi Tahun				
		Renstra Murni (Kantor)			Perubahan Renstra (Badan)	
		2019	2020	2021	2022 Tw. III	2023
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	72,2 point (N.a)	72,2 point (N.a)	72,2 point (N.a)	-	-
2	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	100%	100%	100%	45,75%	-
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, Pilkada dan Pilkades	82,6%	79%	80%	-	-
4	Persentase Ormas yang aktif kategori Aktif	100%	100%	100%	-	-
5	Tingkat Bina Demokratisasi	-	-	-	50%	-

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD", dan ayat (2) menyatakan bahwa "Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Umum di bidang Kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Sumedang 2018-2023 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023".

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana prasarana dan system yang mendukung kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang adalah Misi ke- 2 (dua) yaitu. **“Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan”**.. (kalimat misi dimaksud). Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

2.1.2.1 Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Misi ke-2 yaitu Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Misi kedua : Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan	Meningkatnya kualitas keagamaan, kebudayaan dan demokrasi masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif
			Meningkatnya pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan berdemokrasi	Tingkat Bina Demokratisasi

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat

2. Peningkatan keterlibatan instansi lain dalam perbaikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat
3. Peningkatan pemahaman terhadap proses politik untuk masyarakat
4. Peningkatan keterlibatan ormas dalam proses pembangunan daerah

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 - 2023 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat melalui sosialisasi
2	Peningkatan keterlibatan instansi lain dalam perbaikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat	Koordinasi lintas instansi dalam perbaikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat
3	Peningkatan pemahaman terhadap proses politik untuk masyarakat	Meningkatkan pemahaman masyarakat atas proses politik
4	Peningkatan keterlibatan ormas dalam proses pembangunan daerah	Meningkatkan keterlibatan ormas dalam kegiatan pembangunan daerah dan kemasyarakatan

2.1.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Keselarsan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Tingkat cipta kondisi kondusif	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

		Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Kepercayaan di Daerah Beragama dan Penghayat; 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Meningkatkan partisipasi dalam mendukung proses demokrasi	Tingkat Bina Demokratisasi	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah; 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.
Indikator Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	Persen	100%	$(\text{Jumlah potensi konflik yang tertangani} / \text{jumlah potensi konflik}) \times 100\%$
Meningkatnya pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan berdemokrasi	Tingkat Bina Demokratisasi	Persen	100%	$(\text{Jumlah pembinaan parpol yang mendapatkan kursi} / \text{jumlah parpol yang mendapatkan kursi}) \times 100\%$

Tabel 2.5.a
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dengan Data Awal Tahun 2018 dan Target Tahun 2023 (IKU awal Renstra 2018-2023)

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2018)	Target 2022	Target Akhir Renstra 2023
1	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	Persen	100%	100%	100%
2	Tingkat Bina demokratisasi	Persen	-	100%	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Renstra 2018-2023 (Reviu IKU tahun 2022) Rata-rata realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang tahun 2022 sebesar 100%. Merujuk pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **SANGAT TINGGI**.

Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022 (P. Renstra 2018-2023)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Tingkat Kondisi Kondusif Cipta	%	100%	45,75%	45,75%	Sangat Rendah
Meningkatnya pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan berdemokrasi	Tingkat Bina Demokratisasi	%	100%	50%	50%	Sangat Rendah
Rata-rata					47,88%	Sangat Rendah

Sumber :Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang

3.1.1 TINGKAT CIPTA KONDISI KONDUSIF

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja "Tingkat Cipta Kondisi Kondusif" tahun 2022 sebesar 100%, dan realisasi kinerja 45,75% di Triwulan II tahun 2022. Adapun penjelasan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.1.a
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Persentase Tingkat Cipta Kondisi Kondusif Triwulan II Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	persen	100%	45,75%	45,75%	Sangat Rendah

Sumber : Badan Kesbangpol Triwulan II 2022

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi dan capaian kinerja Tingkat Cipta Kondisi Kondusif Triwulan II tahun 2022 yaitu 45,75%, dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.b
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Cipta Kondisi Kondusif
Triwulan II Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022 (Tw. I)			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	persen	100%	100%	100%	100%	45,75%	45,75%	Sangat Rendah

nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam Perubahan Renstra 2018-2023, target jangka menengah "Tingkat Cipta Kondisi Kondusif" 100%, dan realisasi dari target 100% adalah 45,75% di Triwulan II Tahun 2022.

Tabel 3.1.1.c
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Cipta Kondisi Kondusif
Triwulan II Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022 (Tw. II)	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022
Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	100%	45,75%	45,75%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Cipta Kondisi Kondusif di Kabupaten Sumedang tidak merujuk terhadap Indikator Kinerja Sasaran dikarenakan tidak masuk prioritas Indikator Kinerja Utama di Tingkat Nasional ataupun Provinsi. Walaupun tidak masuk dalam Indikator Sasaran Utama tingkat Provinsi maupun Nasional, Indikator Sasaran Tingkat Cipta Kondisi Kondusif di Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Kabupaten Sumedang dengan berbagai upaya Deteksi Dini, Cegah Dini dengan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah serta Penanganan Konflik Sosial sebagai pemecahan permasalahan yang terjadi di wilayah kabupaten sumedang dengan menghasilkan suatu kebijakan keputusan Bersama yang dilaksanakan secara optimal.

Tabel 3.1.d
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Cipta Kondisi Kondusif
Provinsi/Nasional Triwulan II Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 (Triwulan II)			Ket.
			Provinsi/Nasional	Kabupaten	Capaian Kinerja	Provinsi/Nasional	Kabupaten	Capaian Kinerja	
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	persen	-	100%	100%	-	45,75	45,75	

Sumber : Bakesbangpol Kabupaten Sumedang

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi Indikator Kinerja Utama *Tingkat Cipta Kondisi Kondusif* ($\text{Jumlah potensi konflik yang tertangani} / \text{Jumlah potensi konflik} \times 100\%$), adapun Keberhasilan, kegagalan dan Solusi/Tindak lanjut dalam Capaian Kinerja pelaksanaan kegiatan yang menunjang terhadap IKU "Tingkat Cipta Kondisi Kondusif" tahun 2022 Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang telah melaksanakan kegiatan dari beberapa program dan kegiatan Triwulan II tahun 2022 sebagai berikut :

a. Keberhasilan :

1. Pengawasan ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) : Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual (zoom meeting) dengan maksud membina dan mengawasi ormas yang berkategori aktif di Kabupaten Sumedang. Kegiatan tersebut melibatkan Tim terpadu Pengawasan Ormas di Kabupaten Sumedang dan dihadiri oleh perwakilan pengurus ormas di Kabupaten Sumedang dengan outcome Tertibnya Ormas di Kabupaten Sumedang baik dari sisi administrasi maupun aktivitas ormas yang membangun dan berkontribusi baik terhadap Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Validasi Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) : Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka/ langsung ke lapangan (jemput bola) dengan maksud membina dan mengawasi ormas yang berkategori aktif di Kabupaten Sumedang secara langsung/ tatap muka ke Sekretariat ormas di kabupaten Sumedang sehingga terciptanya akurasi data jumlah ormas yang dibina kategori aktif. Kegiatan tersebut melibatkan Tim Validasi Ormas di Kabupaten Sumedang dengan outcome terciptanya akurasi data jumlah ormas yang dibina kategori aktif di Kabupaten Sumedang.
3. Rakor Forkopimda (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) : Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Kabupaten Sumedang,. Sampai dengan Triwulan II tahun 2022 di kabupaten sumedang telah terjadi 8 potensi konflik/kejadian yang terdiri dari jenis laporan audiensi dan unjuk rasa di Kabupaten Sumedang, dengan rincian sebagai berikut :
 - 4 potensi konflik yang berbuntut Unjuk rasa (2 potensi konflik HANKAM, 1 potensi konflik EKONOMI, 1 potensi konflik BUDAYA);
 - 4 potensi konflik yang berbuntut audiensi (3 potensi konflik SOSIAL, 1 potensi konflik POLITIK)

Sehingga perlunya rakor FORKOPIMDA yang melibatkan Tim FORKOPIMDA dan stakeholder yang terkait dalam penanganan dan pencegahan masalah yang timbul di Kabupaten Sumedang dengan outcome menciptakan Kondisi Kondusif di Kabupaten Sumedang dengan menghasilkan berbagai upaya Deteksi Dini, Cegah Dini dengan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah serta Penanganan Konflik Sosial sebagai pemecahan permasalahan yang terjadi di wilayah kabupaten sumedang dengan menghasilkan suatu kebijakan keputusan Bersama yang dilaksanakan secara optimal.

Secara garis besar segala bentuk potensi konflik yang terjadi di kabupaten sumedang telah tertangani, langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Bakesbangpol bekerjasama dengan instansi vertikal (TNI, POLRI, KEJARI , DPRD dan instansi terkait permasalahan), sehingga potensi konflik yang terjadi tidak menimbulkan gejolak terjadinya Konflik (meluas) di Kabupaten Sumedang

4. Rakor Kewaspadaan Dini Daerah dan Puskominfo (Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya) :
- Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dan Virtual dengan upaya Cegah dini, tangkal dini dan deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang akan mengganggu keamanan di wilayah kabupaten sumedang, serta membuka jaringan informasi dari tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan yang berkomunikasi dan koordinasi dengan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten. Sampai dengan Triwulan II tahun 2022 di kabupaten sumedang telah terjadi 8 potensi konflik/kejadian yang terdiri dari jenis laporan audiensi dan unjuk rasa:
- 4 potensi konflik yang berbuntut Unjuk rasa (2 potensi konflik HANKAM, 1 potensi konflik EKONOMI, 1 potensi konflik BUDAYA);
 - 4 potensi konflik yang berbuntut audiensi (3 potensi konflik SOSIAL, 1 potensi konflik POLITIK)
- Sehingga perlunya rakor Kewaspadaan Dini Daerah sebagai pemecahan permasalahan yang terjadi di wilayah kabupaten sumedang dengan menghasilkan suatu kebijakan keputusan Bersama yang dilaksanakan secara optimal. Secara garis besar segala bentuk potensi konflik yang terjadi di kabupaten sumedang telah tertangani, langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Bakesbangpol bekerjasama dengan instansi vertikal (TNI, POLRI, KEJARI , DPRD dan instansi terkait permasalahan), sehingga potensi konflik yang terjadi tidak menimbulkan gejolak terjadinya Konflik (meluas) di Kabupaten Sumedang
5. Pelaksanaan Monitoring ATHG Idul Fitri (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
- Kegiatan tersebut dilaksanakan secara monitoring ke lapangan di memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat di Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan aktivitas Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 H tahun 2022 bekerjasama dengan unsur instansi vertikal (TNI, POLRI) dan SKPD (Dishub, Dinkes serta SATPOL PP) sehingga menciptakan situasi, kondisi yang aman dan tentram dengan tujuan terciptanya Kondisi Kondusif di Kabupaten Sumedang.
6. Pemantauan Orang Asing (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
- Kegiatan tersebut dilaksanakan secara monitoring ke lapangan untuk memantau segala aktivitas dan keberadaan Orang Asing di Kabupaten Sumedang yang bekerja di Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sumedang beserta keluraganya sehingga memaksimalkan daya guna keberadaan Tenaga Kerja Asing dan memudahkan upaya deteksi dan antisipasi dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan Orang Asing di Kabupaten Sumedang.
7. Rakor Penanganan Konflik Sosial (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
- Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual (zoom meeting) dengan maksud untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat kabupaten sumedang dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera serta meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. upaya penanganan terhadap berbagai ancaman yang akan mengganggu keamanan di wilayah kabupaten sumedang, serta membuka jaringan informasi dari tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan yang berkomunikasi dan koordinasi dengan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten. Sampai dengan Triwulan II tahun 2022 di kabupaten sumedang telah terjadi 8 potensi konflik/kejadian yang terdiri dari jenis laporan audiensi dan unjuk rasa:

- 4 potensi konflik yang berbuntut Unjuk rasa (2 potensi konflik HANKAM, 1 potensi konflik EKONOMI, 1 potensi konflik BUDAYA);
- 4 potensi konflik yang berbuntut audiensi (3 potensi konflik SOSIAL, 1 potensi konflik POLITIK)

Sehingga perlunya rakor Penanganan KONflik Sosial sebagai pencegahan permasalahan yang terjadi di wilayah kabupaten sumedang dengan menghasilkan suatu kebijakan keputusan Bersama yang dilaksanakan secara optimal. Secara garis besar segala bentuk potensi konflik yang terjadi di kabupaten sumedang telah tertangani, langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Bakesbangpol bekerjasama dengan instansi vertikal (TNI, POLRI, KEJARI, DPRD dan instansi terkait permasalahan), sehingga potensi konflik yang terjadi tidak menimbulkan gejala terjadinya Konflik (meluas) di Kabupaten Sumedang.

8. Penguatan FORKOPIMDA (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud meningkatkan sinergitas dan probabilitas melalui Pemda dengan instansi vertikal dalam mewujudkan kondusifitas daerah guna keberlangsungan program pembangunan di kabupaten sumedang.

b. Kegagalan/kendala :

1. Pengawasan ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :
Kegiatan pengawasan ormas dilaksanakan secara virtual, dengan melibatkan Tim terpadu Pengawasan Ormas yang dihadiri pengurus ormas, setidaknya tingkat kehadiran yang sedikit kurang dari jumlah total undangan peserta kegiatan pengawasan ormas di kabupaten sumedang menjadi permasalahan dalam kegiatan tersebut;
2. Validasi Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :
Beberapa ormas tidak memberikan data dan informasi dalam hal perpindahan tempat sekretariat dan pergantian pengurus, serta sekretariat ormas tidak memiliki atau memasang piang sekretariat di alamat masing-masing.
3. Rakor Forkopimda (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Adanya hasil kebijakan/keputusan Rakor yang belum bisa dilaksanakan secara optimal.
4. Rakor Kewaspadaan Dini Daerah dan Puskomin (Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya) :
Pelaporan data informasi terkait stabilitas daerah di kecamatan melalui Kasi Pemerintahan Umum belum optimal secara rutin melaporkan.
5. Pelaksanaan Monitoring ATHG Idul Fitri (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Kemacetan yang terjadi di beberapa titik Pos Pam dan Posyan terjadi karena adanya pertemuan arus kendaraan yang keluar di gerbang Tol, seperti Pospam Jatinangor, Posyan Sumedang Utara dan Pospam Cimalaka.
6. Pemantauan Orang Asing (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
 - Dalam satu perusahaan selalu ada Tenaga Kerja Asing yang kelengkapan dokumen administrasinya belum lengkap;
 - Kekurangan penerjemah Tenaga Kerja Asing dalam suatu perusahaan dalam memudahkan kegiatan Pemantauan Orang Asing di perusahaan.

7. Rakor Penanganan Konflik Sosial (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Belum adanya kesamaan visi dan pemahaman dari SKPD dan Instansi vertical dalam menginventarisasi permasalahan konflik social yang terjadi, sehingga belum adanya data masalah yang dapat menimbulkan konflik
 8. Penguatan FORKOPIMDA (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Keterbatasan anggaran yang belum mengcover seluruh SKPD terkait guna mengoptimalkan kualitas TIM FORKOPIMDA
- c. Solusi/Tindak Lanjut :
1. Pengawasan ormas(Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :
Kegiatan pengawasan aktivitas ormas harus dilaksanakan secara langsung atau tatap muka, dalam hal ini Tim Terpadu pengawasan Ormas terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan ormas di Kabupaten Sumedang.
 2. Validasi Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :
Dalam setiap pelaporan ormas (pembuatan Surat Keterangan Pelaporan Ormas(SKPO)) dilaksanakan survey ke lapangan untuk mengecek terlebih dahulu tempat/sekretariat ormas dan wajib meninformasikan terkait perpindahan sekretariat ataupun kepengurusan kepada pihak Bakesbangpol kabupaten sumedang.
 3. Rakor Forkopimda (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Diupayakan setiap hasil rakor Forkopimda dipublikasikan secara intens dan update secara langsung dan di evaluasi dalam pelaksanaannya.
 4. Rakor Kewaspadaan Dini Daerah dan Puskomin :
Pelaporan data informasi terkait disetiap kecamatan akan dilaporkan melalui aplikasi SIDAKOCAN (Sistem Informasi Data Kecamatan) yang peruntukannya berada di Bakesbangpol Kabupaten Sumedang.
 5. Pelaksanaan Monitoring ATHG Idul Fitri (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Diupayakan adanya cara bertindak dari aparat kepolisian yang mengatur rekayasa lalu-lintas sehingga kemacetan dapat etrurai dan berjalan lancar.
 6. Pemantauan Orang Asing (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
 - Akan diadakannya rapat evaluasi hasil pemantuan Orang Asing terkait Tenaga Kerja Asing yang dipantau keberadaanya di setiap perusahaan terkait dokumen laporan yang masih belum lengkap, bekerjasama dengan instansi vertical dan instansi terkait;
 - Memberikan arahan ke setiap perusahaan untuk segera menggunakan jasa penerjemah Bahasa(translate)
 7. Rakor Penanganan Konflik Sosial (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Akan diadakannya rakor seluruh SKPD dan instansi vertical terkait permasalahan yang tergabung di Tim Penanganan Konflik SOSial di Kabupaten Sumedang, guna membahas data permasalahan (potensi konflik) yang terjadi di Kabupaten Sumedang

8. Penguatan FORKOPIMDA (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Direncanakan kegiatan capacity building yang akan datang lebih ditingkatkan materi dan kualitas pelaksanaanya.

f. **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Persentase Tingkat Cipta Kondisi Kondusif tahun 2022 sebesar **Rp. 3.024.795.000,00** yang terdiri dari 4 program. Sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 1,849,081,675,00** atau **30,12%**.

Tabel 3.1.1.e
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Triwulan II tahun 2022
Persentase Tingkat Cipta Kondisi (DPA Tahun 2022)

Program	Anggaran	Realisasi	Satuan %
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	210,000,000.00	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	200,000,000.00	22,854,150.00	11,43
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	250,000,000.00	89,020,700.00	35,61
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2,364,795,000.00	1,737,206,825.00	73,46
Jumlah Total	3,024,795,000.00	1,849,081,675,00	30,12

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Persentase Tingkat Cipta Kondisi Kondusif Triwulan II tahun 2022 adalah **30,12%**.

Tabel 3.1.1.e
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja
Persentase Tingkat Cipta Kondisi Kondusif Triwulan II Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program Triwulan II	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	45,75%	30,12%	15,63%	Efisien

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program Realisasi Indikator Kinerja Utama *Tingkat Cipta Kondisi Kondusif (Jumlah potensi konflik yang tertangani /Jumlah potensi konflik)x100%*, adapun Keberhasilan, kegagalan dan Solusi/Tindak lanjut dalam Capaian Kinerja pelaksanaan kegiatan yang menunjang terhadap IKU "Tingkat Cipta Kondisi Kondusif" tahun 2022 Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang telah melaksanakan kegiatan dari beberapa program dan kegiatan Triwulan II tahun 2022 sebagai berikut :

a. Keberhasilan :

1. Pengawasan ormas(Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) : Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual (zoom meeting) dengan maksud membina dan mengawasi ormas yang berkategori aktif di Kabupaten Sumedang. Kegiatan tersebut melibatkan Tim terpadu Pengawasan Ormas di Kabupaten Sumedang dan dihadiri oleh perwakilan pengurus ormas di Kabupaten Sumedang dengan outcome Tertibnya Ormas di Kabupaten Sumedang baik dari sisi administrasi maupun aktivitas ormas yang membangun dan berkontribusi baik terhadap Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Validasi Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) : Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka/ langsung ke lapangan (jemput bola) dengan maksud membina dan mengawasi ormas yang berkategori aktif di Kabupaten Sumedang secara langsung/ tatap muka ke Sekretariat ormas di kabupaten Sumedang sehingga terciptanya akurasi data jumlah ormas yang dibina kategori aktif. Kegiatan tersebut melibatkan Tim Validasi Ormas di Kabupaten Sumedang dengan outcome terciptanya akurasi data jumlah ormas yang dibina kategori aktif di Kabupaten Sumedang.
3. Rakor Forkopimda (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) : Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Kabupaten Sumedang,. Sampai dengan Triwulan II tahun 2022 di kabupaten sumedang telah terjadi 8 potensi konflik/kejadian yang terdiri dari jenis laporan audiensi dan unjuk rasa di Kabupaten Sumedang, dengan rincian sebagai berikut :
 - 4 potensi konflik yang berbuntut Unjuk rasa (2 potensi konflik HANKAM, 1 potensi konflik EKONOMI, 1 potensi konflik BUDAYA);
 - 4 potensi konflik yang berbuntut audiensi (3 potensi konflik SOSIAL, 1 potensi konflik POLITIK)

Sehingga perlunya rakor FORKOPIMDA yang melibatkan Tim FORKOPIMDA dan stakeholder yang terkait dalam penanganan dan pencegahan masalah yang timbul di Kabupaten Sumedang dengan outcome menciptakan Kondisi Kondusif di Kabupaten Sumedang dengan menghasilkan berbagai upaya Deteksi Dini, Cegah Dini dengan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah serta Penanganan Konflik Sosial sebagai pemecahan permasalahan yang terjadi di wilayah kabupaten sumedang dengan menghasilkan suatu kebijakan keputusan Bersama yang dilaksanakan secara optimal.

Secara garis besar segala bentuk potensi konflik yang terjadi di kabupaten sumedang telah tertangani, langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Bakesbangpol bekerjasama dengan instansi vertikal (TNI, POLRI, KEJARI , DPRD dan instansi terkait permasalahan), sehingga potensi konflik yang terjadi tidak menimbulkan gejolak terjadinya Konflik (meluas) di Kabupaten Sumedang

- h. Rakor Kewaspadaan Dini Daerah dan Puskomin (Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya) :
- Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dan Virtual dengan upaya Cegah dini, tangkal dini dan deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang akan mengganggu keamanan di wilayah kabupaten sumedang, serta membuka jaringan informasi dari tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan yang berkomukasi dan koordinasi dengan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten. Sampai dengan Triwulan II tahun 2022 di kabupaten sumedang telah terjadi 8 potensi konflik/kejadian yang terdiri dari jenis laporan audensi dan unjuk rasa:
- 4 potensi konflik yang berbuntut Unjuk rasa (2 potensi konflik HANKAM, 1 potensi konflik EKONOMI, 1 potensi konflik BUDAYA);
 - 4 potensi konflik yang berbuntut audensi (3 potensi konflik SOSIAL, 1 potensi konflik POLITIK)
- Sehingga perlunya rakor Kewaspadaan Dini Daerah sebagai pemecahan permasalahan yang terjadi di wilayah kabupaten sumedang dengan menghasilkan suatu kebijakan keputusan Bersama yang dilaksanakan secara optimal. Secara garis besar segala bentuk potensi konflik yang terjadi di kabupaten sumedang telah tertangani, langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Bakesbangpol bekerjasama dengan instansi vertikal (TNI, POLRI, KEJARI , DPRD dan instansi terkait permasalahan), sehingga potensi konflik yang terjadi tidak menimbulkan gejolak terjadinya Konflik (meluas) di Kabupaten Sumedang
3. Pelaksanaan Monitoring ATHG Idul Fitri (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
- Kegiatan tersebut dilaksanakan secara monitoring ke lapangan di memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat di Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan aktivitas Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 H tahun 2022 bekerjasama dengan unsur instansi vertikal (TNI, POLRI) dan SKPD (Dishub, Dinkes serta SATPOL PP) sehingga menciptakan situasi, kondisi yang aman dan tentram dengan tujuan terciptanya Kondisi Kondusif di Kabupaten Sumedang.
4. Pemantauan Orang Asing (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
- Kegiatan tersebut dilaksanakan secara monitoring ke lapangan untuk memantau segala aktivitas dan keberadaan Orang Asing di Kabupaten Sumedang yang bekerja di Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sumedang beserta keluraganya sehingga memaksimalkan daya guna keberadaan Tenaga Kerja Asing dan memudahkan upaya deteksi dan antisipasi dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan Orang Asing di Kabupaten Sumedang.
5. Rakor Penanganan Konflik Sosial (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
- Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual (zoom meeting) dengan maksud untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat kabupaten sumedang dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera serta meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. upaya penanganan terhadap berbagai ancaman yang akan mengganggu keamanan di wilayah kabupaten sumedang, serta membuka jaringan informasi dari tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan yang berkomukasi dan koordinasi dengan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten. Sampai dengan Triwulan II tahun 2022 di kabupaten sumedang telah terjadi 8 potensi konflik/kejadian yang terdiri dari jenis laporan audensi dan unjuk rasa:

- 4 potensi konflik yang berbuntut Unjuk rasa (2 potensi konflik HANKAM, 1 potensi konflik EKONOMI, 1 potensi konflik BUDAYA);
- 4 potensi konflik yang berbuntut audiensi (3 potensi konflik SOSIAL, 1 potensi konflik POLITIK)

Sehingga perlunya rakor Penanganan KONflik Sosial sebagai pencegahan permasalahan yang terjadi di wilayah kabupaten sumedang dengan menghasilkan suatu kebijakan keputusan Bersama yang dilaksanakan secara optimal. Secara garis besar segala bentuk potensi konflik yang terjadi di kabupaten sumedang telah tertangani, langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Bakesbangpol bekerjasama dengan instansi vertikal (TNI, POLRI, KEJARI, DPRD dan instansi terkait permasalahan), sehingga potensi konflik yang terjadi tidak menimbulkan gejolak terjadinya Konflik (meluas) di Kabupaten Sumedang.

8. Penguatan FORKOPIMDA (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dengan maksud meningkatkan sinergitas dan probabilitas melalui Pemda dengan instansi vertikal dalam mewujudkan kondusifitas daerah guna keberlangsungan program pembangunan di kabupaten sumedang.

b. Kegagalan/kendala :

1. Pengawasan ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :
Kegiatan pengawasan ormas dilaksanakan secara virtual, dengan melibatkan Tim terpadu Pengawasan Ormas yang dihadiri pengurus ormas, setidaknya tingkat kehadiran yang sedikit kurang dari jumlah total undangan peserta kegiatan pengawasan ormas di kabupaten sumedang menjadi permasalahan dalam kegiatan tersebut;
2. Validasi Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :
Beberapa ormas tidak memberikan data dan informasi dalam hal perpindahan tempat sekretariat dan pergantian pengurus, serta sekretariat ormas tidak memiliki atau memasang plang sekretariat di alamat masing-masing.
3. Rakor Forkopimda (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Adanya hasil kebijakan/keputusan Rakor yang belum bisa dilaksanakan secara optimal.
4. Rakor Kewaspadaan Dini Daerah dan Puskomin (Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya) :
Pelaporan data informasi terkait stabilitas daerah di kecamatan melalui Kasi Pemerintahan Umum belum optimal secara rutin melaporkan.
5. Pelaksanaan Monitoring ATHG Idul Fitri (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Kemacetan yang terjadi di beberapa titik Pos Pam dan Posyan terjadi karena adanya pertemuan arus kendaraan yang keluar di gerbang Tol, seperti Pospam Jatinangor, Posyan Sumedang Utara dan Pospam Cimalaka.
6. Pemantauan Orang Asing (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
 - Dalam satu perusahaan selalu ada Tenaga Kerja Asing yang kelengkapan dokumen administrasinya belum lengkap;
 - Kekurangan penerjemah Tenaga Kerja Asing dalam suatu perusahaan dalam memudahkan kegiatan Pemantauan Orang Asing di perusahaan.

7. Rakor Penanganan Konflik Sosial (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Belum adanya kesamaan visi dan pemahaman dari SKPD dan Instansi vertical dalam menginventarisasi permasalahan konflik social yang terjadi, sehingga belum adanya data masalah yang dapat menimbulkan konflik
 8. Penguatan FORKOPIMDA (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Keterbatasan anggaran yang belum mengcover seluruh SKPD terkait guna mengoptimalkan kualitas TIM FORKOPIMDA
- c. Solusi/Tindak Lanjut :
1. Pengawasan ormas(Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :
Kegiatan pengawasan aktivitas ormas harus dilaksanakan secara langsung atau tatap muka, dalam hal ini Tim Terpadu pengawasan Ormas terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan ormas di Kabupaten Sumedang.
 2. Validasi Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :
Dalam setiap pelaporan ormas (pembuatan Surat Keterangan Pelaporan Ormas(SKPO)) dilaksanakan survey ke lapnagan untuk mengecek terlebih dahulu tempat/sekretariat ormas dan wajib meninformasikan terkait perpindahan sekretariat ataupun kepengurusan kepada pihak Bakesbangpol kabupaten sumedang.
 3. Rakor Forkopimda (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Diupayakan setiap hasil rakor Forkopimda dipublikasikan secara intens dan update secara langsung dan di evaluasi dalam pelaksanaanya.
 4. Rakor Kewaspadaan Dini Daerah dan Puskomin :
Pelaporan data informasi terkait disetiap kecamatan akan dilaporkan melalui aplikasi SIDAKOCAN (Sistem Informasi Data Kecamatan) yang peruntukannya berada di Bakesbangpol Kabupaten Sumedang.
 5. Pelaksanaan Monitoring ATHG Idul Fitri (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Diupayakan adanya cara bertindak dari aparat kepolisian yang mengatur rekayasa lalu-lintas sehingga kemacetan dapat eturai dan berjalan lancar.
 6. Pemantauan Orang Asing (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
 - Akan diadakannya rapat evaluasi hasil pemantuan Orang Asing terkait Tenaga Kerja Asing yang dipantau keberadaanya di setiap perusahaan terkait dokumen laporan yang masih belum lengkap, bekerjasama dengan instansi vertical dan instansi terkait;
 - Memberikan arahan ke setiap perusahaan untuk segera menggunakan jasa penerjemah Bahasa(translate)
 7. Rakor Penanganan Konflik Sosial (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Akan diadakannya rakor seluruh SKPD dan instansi vertical terkait permasalahan yang tergabung di Tim Penanganan Konflik SOsial di Kabupaten Sumedang, guna membahas data permasalahan (potensi konflik) yang terjadi di Kabupaten Sumedang
 8. Penguatan FORKOPIMDA (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :

Direncanakan kegiatan capacity building yang akan datang lebih ditingkatkan materi dan kualitas pelaksanaannya.

3.1.2 Tingkat Bina Demokratisasi

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja "Tingkat Bina Demokratisasi" tahun 2022 sebesar 100%, dan realisasi kinerja Triwulan II yang sudah ditentukan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.2.a
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Tingkat Bina Demokratisasi Triwulan II Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan berdemokrasi	Tingkat Bina Demokratisasi	persen	100%	50%	50%	Sangat Rendah

Sumber : Badan Kesbangpol Triwulan II 2022

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi dan capaian kinerja Tingkat Bina Demokratisasi tahun Tw. II 2022 yaitu 50%, dan Capaian Kinerja tercapai dan teralisasi.

Tabel 3.1.2.b
Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Bina Demokratisasi Triwulan II Tahun 2022
dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan berdemokrasi	Tingkat Bina Demokratisasi	persen	-	-	-	100%	50%	50%	Sangat Rendah

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam Perubahan Renstra 2018-2023, target jangka menengah Tingkat Bina Demokratisasi 100%, dan realisasi sebesar 100% tercapai di Tahun 2022.

Tabel 3.1.2.c
Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Bina Demokratisasi tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2022 (Triwulan II)	Persentase Realisasi Target Sasaran RPJMD Sampai Tahun akhir
Tingkat Bina Demokratisasi	100%	50%	50%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Bina Demokratisasi di Kabupaten Sumedang tidak merujuk terhadap Indikator Kinerja Sasaran dikarenakan tidak masuk prioritas Indikator Kinerja Utama di Tingkat Nasional ataupun Provinsi. Walaupun tidak masuk dalam Indikator Sasaran Utama tingkat Provinsi maupun Nasional, Indikator Sasaran Tingkat Bina Demokratisasi di Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang konsultasi dan koordinasi dengan mitra kerja Pemerintah Daerah (Bakesbangpol) dengan Partai Politik sehingga menghasilkan outcome meningkatkan peran parpol dalam partisipasi masyarakat yang berdemokrasi dan tingginya rasa tertib administrasi dalam pelaporan

Tabel 3.1.d
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Bina Demokratisasi
Provinsi/Nasional Triwulan II Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 (Triwulan II)			Ket.
			Provinsi/Nasional	Kabupaten	Capaian Kinerja	Provinsi/Nasional	Kabupaten	Capaian Kinerja	
Meningkatnya pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan berdemokrasi	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	persen	-	-	100%	-	50	50	

Sumber : Bakesbangpol Kabupaten Sumedang

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Adapun Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi/Tindak Lanjut hasil dari Capaian Kinerja dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang terhadap IKU "Tingkat Bina Demokratisasi" ((Jumlah pembinaan pengurus parpol yang mendapatkan kursi di DPRD/Jumlah Pengurus parpol yang mendapatkan kursi di DPRD)x100%) tahun 2022 Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang telah melaksanakan kegiatan dari beberapa program dan kegiatan Triwulan II tahun 2022 sebagai berikut :

a. Keberhasilan :

1. Kemitraan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka/ langsung ke lapangan (jemput bola) dengan maksud konsultasi dan koordinasi dengan mitra kerja Pemerintah Daerah (Bakesbangpol) dengan parpol sehingga menghasilkan outcome meningkatkan peran parpol dalam partisipasi masyarakat yang berdemokrasi dan tingginya rasa tertib administrasi dalam pelaporan.
2. Penelitian Bantuan Keuangan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :
 - Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan parpol dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban;
 - Meningkatnya pemahaman Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol kepada 8 pengurus partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sumedang.

b. Kegagalan/Kendala :

1. Kemitraan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :
 - Beberapa kantor secretariat yang ada di kecamatan belum memiliki/terpasang plang nama secretariat;
 - Bangunan kantor sekretariat masih menempati rumah milik pribadi atau menyewa/mengontrak bangunan orang lain;
 - Kelengkapan secretariat mebeuler, sarana computer dan lain sebagainya belum lengkap
2. Penelitian Bantuan Keuangan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :
 - Pemriksaan kelengkapan dokumen proposal administrasi setiap partai politik tidak cukup satu kali, sehingga harus diperbaiki kembali;
 - Pemenuhan persyaratan Bantuan Keuangan partai politik tidak tepat pelaporan

c. Solusi/Tindak Lanjut :

1. Kemitraan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :
 - Pengurus parpol di wilayah kecamatan harus terus menjalin komunikasi baik dengan pengurus parpol di kabupaten sehingga kebutuhan-kebutuhan kantor sekretariat bias terpenuhi secara optimal dan baik;
 - Pengurus parpol di wilayah kecamatan harus terus menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah bdaerah kabupaten sumedang (Bakesbangpol) sehingga terciptanya Tingkat Bina Demokratisasi yang baik di Kabupaten Sumedang
2. Penelitian Bantuan Keuangan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :
 - Pengurus dan pengelola administrasi partai dapat mensosialisasikan kembali hal-hal terkait penyusunan proposal bantuan keuangan partai yang benar kepada jajaran pengurus parpol sehingga semakin banyak pengrus partai yang memahami berbagai ketentuan dan regulasi terkait penyusunan bantuan keuangan parpol;
 - Kepala Badan Kesbangpol membuat angkeran kepada pengurus partai guna menindaklanjuti keterlambatan pengajuan proposal bantuan keuangan parpol yang tidak memenuhi persyaratan sesuai regulasi yang telah ditetapkan

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Persentase Tingkat Bina Demokratisasi triwulan II tahun 2022 sebesar **Rp. 1.242.451.000,00** yang terdiri dari 1 program, 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan. Sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 1,078,210,700.00** atau **86,78%**.

Tabel 3.1.2.d
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Triwulan II tahun 2022
Tingkat Bina Demokratisasi (DPA tahun 2022)

Program	Anggaran	Realisasi	%
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1,242,451,000.00	1,078,210,700.00	86,78
Jumlah Total	1,242,451,000.00	1,078,210,700.00	86,78

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Persentase Tingkat Bina Demokratisasi Triwulan II tahun 2022 adalah **86,78%**. Dapat dilihat ditabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.2.e
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja
Tingkat Bina Demokratisasi Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan berdemokrasi	Tingkat Bina Demokratisasi	50%	86,78%	-36,78%	Kurang Efisien

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program penunjang Capaian Kinerja Persentase Tingkat Bina Demokratisasi, adapun Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi/Tindak Lanjut hasil dari Capaian Kinerja dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang terhadap IKU "Tingkat Bina Demokratisasi" ((Jumlah pembinaan pengurus parpol yang mendapatkan kursi di DPRD/Jumlah Pengurus parpol yang mendapatkan kursi di DPRD)x100%) tahun 2022 Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang telah melaksanakan kegiatan dari beberapa program dan kegiatan Triwulan II tahun 2022 sebagai berikut :

a. Keberhasilan :

1. Kemitraan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka/ langsung ke lapangan (jemput bola) dengan maksud konsultasi dan koordinasi dengan mitra kerja Pemerintah Daerah (Bakesbangpol) dengan parpol sehingga menghasilkan outcome meningkatkan peran parpol dalam partisipasi masyarakat yang berdemokrasi dan tingginya rasa tertib administrasi dalam pelaporan.
2. Penelitian Bantuan Keuangan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :
 - Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan parpol dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban;
 - Meningkatnya pemahaman Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol kepada 8 pengurus partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sumedang.

b. Kegagalan/Kendala :

1. Kemitraan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :
 - Beberapa kantor sekretariat yang ada di kecamatan belum memiliki/terpasang plang nama sekretariat;

- Bangunan kantor sekretariat masih menempati rumah milik pribadi atau menyewa/mengontrak bangunan orang lain;
 - Kelengkapan sekretariat mebeuler, sarana computer dan lain sebagainya belum lengkap
2. Penelitian Bantuan Keuangan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :
- Pemeriksaan kelengkapan dokumen proposal administrasi setiap partai politik tidak cukup satu kali, sehingga harus diperbaiki kembali;
 - Pemenuhan persyaratan Bantuan Keuangan partai politik tidak tepat pelaporan
- c. Solusi/Tindak Lanjut :
1. Kemitraan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :
- Pengurus parpol di wilayah kecamatan harus terus menjalin komunikasi baik dengan pengurus parpol di kabupaten sehingga kebutuhan-kebutuhan kantor sekretariat bias terpenuhi secara optimal dan baik;
 - Pengurus parpol di wilayah kecamatan harus terus menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah bdaerah kabupaten sumedang (Bakesbangpol) sehingga terciptanya Tingkat Bina Demokratisasi yang baik di Kabupaten Sumedang
2. Penelitian Bantuan Keuangan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :
- Pengurus dan pengelola administrasi partai dapat mensosialisasikan kembali hal-hal terkait penyusunan proposal bantuan keuangan partai yang benar kepada jajaran pengurus parpol sehingga semakin banyak pengurus partai yang memahami berbagai ketentuan dan regulasi terkait penyusunan bantuan keuangan parpol;
 - Kepala Badan Kesbangpol membuat angkeran kepada pengurus partai guna menindaklanjuti keterlambatan pengajuan proposal bantuan keuangan parpol yang tidak memenuhi persyaratan sesuai regulasi yang telah ditetapkan

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Pada tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang melaksanakan 5 program, 5 kegiatan dan 7 Sub Kegiatan di Urusan (Bidang). Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang tahun 2022 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Tahun Anggaran sebesar **Rp. 4,267,246,000.00**. Sedangkan sampai dengan bulan Juni (Tw.II) tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang terealisasi anggaran sebesar **Rp. 1,849,081,675.00** atau sebesar **41,46%**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan (urusan/bidang) Triwulan II
DPA Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTAS E REALISASI (%)	SISA ANGGARAN
1	Meningkatn ya pemahaman masyarakat terhadap	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	100%	program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	210,000,000.00	0	0	210,000,000.00

ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	210,000,000.00	0	0	210,000,000.00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	210,000,000.00	0	0	210,000,000.00
	program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	200,000,000.00	22,854,150.00	11,43	177,145,850.00
	Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	200,000,000.00	22,854,150.00	11,43	177,145,850.00
	Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200,000,000.00	22,854,150.00	11,43	177,145,850.00
	program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	250,000,000.00	89,020,700.00	35,61	160,979,300.00
	Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	250,000,000.00	89,020,700.00	35,61	160,979,300.00
	Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250,000,000.00	89,020,700.00	35,61	160,979,300.00

				program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik	2,364,795,000.00	1,737,206,825.00	73,46	627,588,175.00
				Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	2,364,795,000.00	1,737,206,825.00	73,46	627,588,175.00
				Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35.000.000	18,506,625.00	52,28	16,4973,375.00
				Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2,329,795,000.00	1,718,700,200.00	73,77	627,588,175.00
				program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika budaya	1,242,451,000.00	1,078,210,700.00	86,78	164,240,300.00
2	Meningkatnya pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan berdemokrasi	Tingkat Bina Demokrasi	100%	Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, ser	1,242,451,000.00	1,078,210,700.00	86,78	164,240,300.00

			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1,207,451,000.00	1,059,574,700.00	87,75	147,876,300.00
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	35,000,000.00	18,636.000.00	53,25	16,364,000.00
TOTAL				4,267,246,000.00	1,849,081,675.00	41,46	2,148,164,000.00

Sedangkan Pada tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang melaksanakan 5 program, 5 kegiatan dan 7 Sub Kegiatan di Urusan (Bidang). Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang tahun 2021 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebesar **Rp. 7.644.784.145,00**. Sedangkan sampai dengan bulan Desember 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang terealisasi anggaran sebesar **Rp. 7.528.509.463,00** atau sebesar **98,48%**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.b
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Bidang (Urusan)
DPPA Perubahan Tahun Sebelumnya (2021)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE REALISASI (%)	SISA ANGGARAN
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Negara nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	100%	program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	31.390.000,00	28.159.000,00	89,71	3.231.000,00
			Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	31.390.000,00	28.159.000,00	89,71	3.231.000,00
			Sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela	31.390.000,00	28.159.000,00	89,71	3.231.000,00

bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan				
program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	176.500.000,00	170.299.000,00	96,49	6.201.000,00
Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	176.500.000,00	170.299.000,00	96,49	6.201.000,00
Sub kegiatan pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	176.500.000,00	170.299.000,00	96,49	6.201.000,00
program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	418.000.000,00	327.880.000,00	99,96	120.000
Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	328.000.000,00	327.880.000,00	99,96	120.000
Sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	100	0
Sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	238.000.000,00	237.880.000,00		99,95

			program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik	3.122.889.000,00	3.117.870.000,00	99,84	5.019.000,00
			Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	3.122.889.000,00	3.117.870.000,00	99,84	5.019.000,00
			Sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	27.200.000,00	27.130.000,00	99,74	70.000,00
			Sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	3.095.689.000,00	3.090.740.000,00	99,84	4.949.000,00
			program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan penge	1.122.446.000,00	1.120.268.300,00	99,81	2.177.700,00
Meningkatnya pembinaan terhadap pengurus atau anggota partai politik dalam kehidupan berdemokrasi	Tingkat Bina Demokratisasi	100%	Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan	1.122.446.000,00	1.120.268.300,00	99,81	2.177.700,00

		umum/pemilihan umum kepala daerah, ser				
		Sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	1.110.046.000,00	1.108.613.300,00	99,87	1.432.700,00
		Sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	12.400.000,00	11.655.000,00	93,99	745.000,00
TOTAL			7.644.784.145	7.628.509.463	98,48	116.274.682

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 rata-rata sebesar **47,88%** (**Sangat Rendah**) dan Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2022 rata-rata sebesar **41,46%** sesuai Permandagri nomor 90 tahun 2019 dan Perubahan Renstra 2018-2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang dengan rincian sebagai berikut :

- 1.) a. Capaian kinerja Indikator Sasaran **Tingkat Cipta Kondisi Kondusif** sebesar 45,75%. (**Sangat Rendah**);
 - b. Realisasi anggaran Program dan Kegiatan yang membidik IKU **Tingkat Cipta Kondisi Kondusif** sebesar 30,12%. (**Sangat Rendah**);
- 2.) a. Capaian Kinerja Indikator Sasaran **Tingkat Bina Demokratisasi** sebesar 50%. (**Sangat Tinggi**);
 - b. Realisasi anggaran Program dan Kegiatan yang membidik IKU **Tingkat Bina Demokratisasi** sebesar 86,78%. (**Tinggi**);

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2022 maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- **Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Cipta Kondisi Kondusif**

Adapun Souhusi/tindak lanjut Capaian Kinerja dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang terhadap IKU "Tingkat Cipta Kondisi Kondusif" tahun 2022 Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang telah melaksanakan aktivitas kegiatan dari beberapa program dan kegiatan Triwulan II tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pengawasan ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :

Kegiatan pengawasan aktivitas ormas harus dilaksanakan secara langsung atau tatap muka, dalam hal ini Tim Terpadu pengawasan Ormas terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan ormas di Kabupaten Sumedang.
2. Validasi Ormas (Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) :

Dalam setiap pelaporan ormas (pembuatan Surat Keterangan Pelaporan Ormas(SKPO)) dilaksanakan survey ke lapangan untuk mengecek terlebih dahulu tempat/sekretariat ormas dan wajib meninformasikan terkait

perpindahan sekretariat ataupun kepengurusan kepada pihak Bakesbangpol kabupaten sumedang.

3. Rakor Forkopimda (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Diupayakan setiap hasil rakor Forkopimda dipublikasikan secara intens dan update secara langsung dan di evaluasi dalam pelaksanaannya.
4. Rakor Kewaspadaan Dini Daerah dan Puskomin :
Pelaporan data informasi terkait disetiap kecamatan akan dilaporkan melalui aplikasi SIDA KOCAN (Sistem Informasi Data Kecamatan) yang peruntukannya berada di Bakesbangpol Kabupaten Sumedang.
5. Pelaksanaan Monitoring ATHG Idul Fitri (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Diupayakan adanya cara bertindak dari aparat kepolisian yang mengatur rekayasa lalu-lintas sehingga kemacetan dapat etrurai dan berjalan lancar.
6. Pemantauan Orang Asing (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
 - Akan diadakannya rapat evaluasi hasil pemantuan Orang Asing terkait Tenaga Kerja Asing yang dipantau keberadaanya di setiap perusahaan terkait dokumen laporan yang masih belum lengkap, bekerjasama dengan instansi vertical dan instansi terkait;
 - Memberikan arahan ke setiap perusahaan untuk segera menggunakan jasa penerjemah Bahasa(translate)
7. Rakor Penanganan Konflik Sosial (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Akan diadakannya rakor seluruh SKPD dan instansi vertical terkait permasalahan yang tergabung di Tim Penanganan Konflik SOsial di Kabupaten Sumedang, guna membahas data permasalahan (potensi konflik) yang terjadi di Kabupaten Sumedang
8. Penguatan FORKOPIMDA (Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial) :
Direncanakan kegiatan capacity building yang akan dating lebih ditingkatkan materi dan kualitas pelaksanaannya.

- **Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Bina Demokratisasi**

Adapun solusi/tindak lanjut Capaian Kinerja dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang terhadap IKU "Tingkat Bina Demokratisasi" tahun 2022 Badan Kesbangpol Kabupaten Sumedang telah melaksanakan aktivitas kegiatan dari beberapa program dan kegiatan Triwulan II tahun 2022 sebagai berikut

1. Kemitraan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :
 - Pengurus parpol di wilayah kecamatan harus terus menjalin komunikasi baik dengan pengurus parpol di kabupaten sehingga kebutuhan-kebutuhan kantor sekretariat bias terpenuhi secara optimal dan baik;
 - Pengurus parpol di wilayah kecamatan harus terus menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah bdaerah kabupaten sumedang (Bakesbangpol) sehingga terciptanya Tingkat Bina Demokratisasi yang baik di Kabupaten Sumedang
2. Penelitian Bantuan Keuangan Parpol (Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik) :
 - Pengurus dan pengelola administrasi partai dapat mensosialisasikan kembali hal-hal terkait penyusunan proposal bantuan keuangan partai yang benar kepada jajaran pengurus parpol sehingga semakin banyak pengrus partai yang memahami berbagai ketentuan dan regulasi terkait penyusunan bantuan keuangan parpol;
 - Kepala Badan Kesbangpol membuat angkeran kepada pengurus partai guna menindaklanjuti keterlambatan pengajuan proposal bantuan keuangan parpol yang tidak memenuhi persyaratan sesuai regulasi yang telah ditetapkan.
- Dalam pencapaian efesiensi anggaran akan kembali diusulkan di Perubahan anggaran sesuai target di perencanaan outcome yang lebih dari tahun sebelumnya ataupun sekarang, demi menunjang tujuan SKPD yaitu "Terciptanya Sumedang yang Kondusif dan Demokratis"
- Melakukan publikasi/sosialisasi secara berkala tentang pencapaian kinerja, baik secara pemenuhan dokumen maupun melalui administrasi yang akuntabilitas dan media sosial Website resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang kesbangpol.sumedangkab.go.id;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Triwulan II Tahun 2022, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Sumedang, 30 Juni 2022

Kepala Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten sumedang



Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si

NIP. 19660228 199901 1 001